

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan diatas maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pemanan Direktorat Lalu Lintas Angkutan Jalan dalam hal ini Unit Pelaksana penimbangan yang ada di provinsi Gorontalo, masih terdapat perbedaan dalam proses penegakan hukum. Tidak bisa dibilang baik karena terdapat perbedaan dalam pengambilan tindakan dari kedua unit pelaksana penimbangan, padahal dasar hukum sebagai pegangan dari tugas dan fungsi mereka adalah sama. Dalam melakukan fungsi pengawasan muatan barang, memantau arus barang keluar masuk provinsi itu sudah tepat, tapi dalam proses penindakan yang menjadi pembedanya.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses penegakan hukum dalam proses angkut muat barang anatar lain ; undang-undang (aturan) sebagai dasar penerapan sanksi tidak begitu kuat, penegak hukum dalam hal ini petugas penimbangan yang menunjukkan perbedaan penindakan yang tegas, sarana dan fasilitas gudang penyimpanan barang yang menjadi alasan untuk tidak melakukan pembongkaran muatan, masyarakat yang tidak mau peka dan tidak mau menaati aturan dalam angkut muat barang, dan budaya buruk masyarakat dalam menanggapi substansi dari hukum yang mengatur.

1.2 Saran

1. Dalam menjalankan peran untuk proses pengawasan muatan kendaraan barang petugas harus lebih berani dalam menegakkan aturan untuk kedua lokasi jembatan penimbangan tersebut, karena dasar hukumnya sama jadi dalam proses penindakanpun kiranya harus sama.
2. Dalam mengatasi beberapa faktor kendala seperti undang-undang(aturan), penegak hukum(petugas), sarana dan fasilitas, masyarakat dan budaya dari perlu adanya kajian sebagai tolak ukur dari suatu periode kegiatan yang telah di ambil dalam beberapa waktu agar dapat menilai dan mengintrospeksi bagian mana yang perlu adanya peningkatan maupun perubahan secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Bambang Sunggono, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo
- C. Jotin Khisty, B. Kent Lall, 2005, *Dasar-dasar Rekayasa Transportasi jilid 1*, Jakarta, Erlangga
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, 2002, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta, Bumi Aksara
- H.M.N. Purwosujipto, 1981, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3*, Jakarta, Djambatan
- Ilhami Bisri, 2013, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada
- L.J Van Apeldoorn, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT. Pradya Paramita
- Profil Dinas Perhubungan Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo
- Satjipto Rahardjo, 2005, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Angkasa
- Siswanto Sunarno, 2014, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta, PT. Sinar Grafika
- Suratman dan Philips Dillah, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta
- Sution Usman Adji dkk, 1991, *Hukum Pengangkutan Di Indonesia*, Jakarta, PT. Rineka Cipta
- Suriansyah Murhani, S.H.,M.H, 2008, *Aspek Hukum Pengawasan Pemerinta Daerah*, Jogjakarta, Laksbang Mediatama
- Soegijatna Tjakranegara, 1995, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Jakarta, PT. Rineka Cipta
- Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada

Tim Prima Pena, 2006, *Kamus Ilmiah Populer Edisi Lengkap Referensi Ilmiah Idiologi, Politik, Hukum, Ekonomi, Budaya dan Sains*, Surabaya, Gitamedia Press

W. Riawan Tjandra, 2006, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia

Witono Hidayat Yuliadi, 2014, *Undang-Undang Lalu Lintas dan Aplikasinya*, Jakarta, Dunia Cerdas

Yulies Tiana Masriani, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika

2. Perundang-undangan

Keputusan Menteri Nomor 5 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Dijalan

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 Tentang Pemeriksaan kendaraan Bermotor di Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

3. Internet

<http://kaghoo.blogspot.com/2010/11/pengertian-peranan.html> Di akses tgl 11 Mar 2015

<http://umbangs.blogspot.com/2012/06/pelanggaran.html>, Di akses tgl 3 Sep 2014

http://www.academia.edu/8105249/SISTEM_TRANSPORTASI_1_I_PENDAHULUAN, Di akses tgl 26 Nov 2014

<http://azekekarora.blogspot.com/2013/11/pemerintahan-pusat-dan-daerah.html>, Di akses tgl 28 Juli 2015

<http://tieffani-mega.blogspot.com/2012/04/pembagian-kekuasaan-antara-pemerintah.html>

Diakses tgl 28 Juli 2015

DOKUMENTASI :

Poto Penindakan di Jembatan Botutonuo :

Pada Bulan Maret





Selajutnya Pada Bulan April





Beberapa Wawancara dengan Narasumber :





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Curriculum Vitae

1. IDENTITAS



Nama : Taufik
NIM : 271 410 056
Tempat, Tanggal Lahir : Manado, 14 September 1992
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum
Angkatan : 2010/2011
Status : Mahasiswa Murni
Agama : Islam

2. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Negeri(SDN) 54 Perkamil, Manado, Tahun 2002.
2. Sekolah Dasar Negeri(SDN) 46 Kota Selatan, Gorontalo, Tahun 2004.
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1, Kota Gorontalo, Tahun 2007.
4. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 3, Kota Gorontalo, Tahun 2010.
5. Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Tahun 2015.

3. KEGIATAN YANG PERNAH DIIKUTI

1. Peserta Orientasi Akademik dan Potensi Mahasiswa Baru (ORASIMARU) Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UNG 2010.
2. Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Manado, 2012.
3. Peserta Praktek Peradilan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Makassar 2012.
4. Peserta Kuliah Kerja SIBERMAS (KKS) UNG 2013, Desa Dulamayo, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo.